

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. (2002). *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Chatamarrasjid. (2000). *Menyingkap Tabir Perseroan Kapita Seleka Hukum Perusahaan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Djoko Prakoso. (1984). *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*. Ghalia Indonesia.
- Dumairy, & Nugroho, T. (2014). *Ekonomi Pancasila dan Warisan Pemikiran Mubyarto*. Gajah Mada University Press.
- Gunawan Widjaja. (2008). *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik*. PT, Praninta Offset.
- Gunawan, Y. S. H. , M. H. , M. M. (2015). *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila* (N. F. Atif, Ed.; Vol. 1). PT Refika Aditama.
- Kasmir dan Jakfar. (2016). *Studi Kelayakan Bisnis (Edisi Revisi)*. Prenadamedia Group.
- Marwan Effendi. (2005). *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*. PT. Gramedia Pustaka.
- Mubyarto. (1987). *Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan*. LP3ES.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. (2003). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* . Citra Aditya Bakti.
- Purba Orinton. (2011). *Petunjuk Praktis Bagi RUPS Komisaris dan Perseroan Terbatas Agar Terhindar dari Jerat Hukum* ' (1st ed.). Raih Asa Sukses.

- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas.
- Rastuti, T. (2015). *Seluk Beluk Perusahaanaan dan Hukum Perusahaan* (Anna, Ed.; 1st ed., Vol. 1). PT Refika Aditama.
- Rastuti, T., Pharmacista, G., & Santika, T. (2018). *Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan* (Rachmi, Ed.; 1st ed., Vol. 1). PT Refika Aditama.
- Rastuti, T. S. H. , M. H. (2015). *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan* (Anna, Ed.; 1st ed., Vol. 1). PT. Refika Aditama
- Salim, H., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (2nd ed.). Rajawali Press.
- Sembiring Sentosa. (2012). *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Nuansa Aulia.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

C. JURNAL

- Agung, G., & Putra, I. B. (2020). Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(6), 867.
- Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 13–23.
- Astrid Bella Angita, & Dudung Hidayat. (2018). Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Melakukan Gugatan Pembayaran Uang Pengganti (Studi Kasus Perkara Korupsi Di Kabupaten Cirebon). *Hukum Responsif*, 9(2), 50.
- Bahar, M. S., & Susanto, R. D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenang-Wenangan Pengusaha. *Jurnal Legisla*, 14(2), 214–231.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Eleanora, F. N. (2012). Pancasila sebagai norma dasar dalam sistem hukum Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(1), 141–165.
- Fahrurrozi Nul, H. (2022). Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Dalam Pembubaran Pt. Gemilang Sukses Garmindo [*Doctoral dissertation*, Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/105689>

- Harkristuti Harkrisnowo. (2001). Menyoal Independensi Kejaksaan Agung Beberapa Catatan pemikiran. *Kumpulan Makalah Komisi Hukum Nasional*, 44.
- Hasbullah F Sjawie. (2017). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires. *Jurnal Hukum Prioris*, 6(1), 24–25.
- Julianty, V., & Putra, M. F. M. (2022). Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 239–252.
- Marsudi, K. E. R., & Purbasari, V. A. (2022). Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 27–42. <https://doi.org/10.37680/ijief.v2i1.1584>
- Nugroho, E., & Qustulani, M. (2021). Konsep Ekonomi Pancasila Prof. Dr. Mubyarto Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 218–232.
- Nurmayanti, R. (2017). Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi. *Jurnal Akta*, 4(4), 609–622.
- Pamungkas, T., Jamrizal, J., & Us, K. A. (2024). Kepemimpinan Partisipatif, Delegasi, Dan Pemberian Kewenangan. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 2(2), 99–110.
- Paramadani, S. P. (2023). Tinjauan Hukum Pembubaran Perseroan Terbatas Atas Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sesuai dengan Aturan Hukum Indonesia dan Malaysia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 1025–1034. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2874>

- Prayoga, A., & Rofii, M. S. (2020). Pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Memperkuat Ketahanan Nasional. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(1), 78–87. <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3432>
- Prayoga, A., & Syaâ, M. (2020). Pembubaran perseroan terbatas oleh kejaksaan sebagai upaya memperkuat ketahanan nasional. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(1), 78–87.
- Puasa, R. R., Lumolos, J., & Kumayas, N. (2018). Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Rahmadany, R. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas (Csr) Menurut Undang- Undang No. 40 Tahun 2007. *Juripol*, 4(2), 214. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11133>
- Rahmah, U. F. (2023). Kewenangan Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. *Lex Economica Journal*, 1(1), 55..
- Ridwan Khairandy. (2007). Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum (3rd ed., Vol. 26). *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Roberto Rinaldo Sondak. (2016). Tugas dan Kewenangan Dewan Komisaris Terhadap Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Lex Privatum*, 4(4), 182.
- Rudy, R. (2015). Kedudukan Dan Arti Penting Pembukaan Uud 1945. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.371>
- Ryamirzad dan Galang Fauzan Prawinda. (2020). Karakteristik Persetujuan Dewan Komisaris Terhadap Kewenangan Direksi Menjaminkan Aset Perusahaan. *Perspektif*, 25(5), 86–97.

- Salim, A. (2019). Ekonomi Pancasila Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Ekonomi. *Jurnal Penkomi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.33627/pk.v2i1.150>
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31–38.
- Sri Wahyuni. (2021). Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pertanggungjawaban Pidannya (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/PID/2019/PT.BTN). *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(2), 174–175.
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859–2866.
- Supriyono, O. :, & Hum, M. (2016). Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat. In *Jurnal Ilmiah FENOMENA: Vol. XIV (Issue 2)*.
- Tauda, G. A. (2018). Pemaknaan Pancasila Sebagai Norma Fundamental Negara. *Humano: Jurnal Penelitian*, 9(2), 296–311.
- Yanuarsi, S., Perseroan, K., Sudut, T., Tanggung, P., & Direksi, J. (2020). Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi. *Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi*, 18, 283. <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/289/250>

D. LAIN-LAIN

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2015). *Perseroan Terbatas*.

Dokumen Pembubaran PT. Bedjoe Makmur Bersama, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (2021).